



Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

Fatih Gama Abisono, SIP, MA.

PAHAM MODERN

BENTUK
NEGARA

BENTUK
PEMERINTAHAN

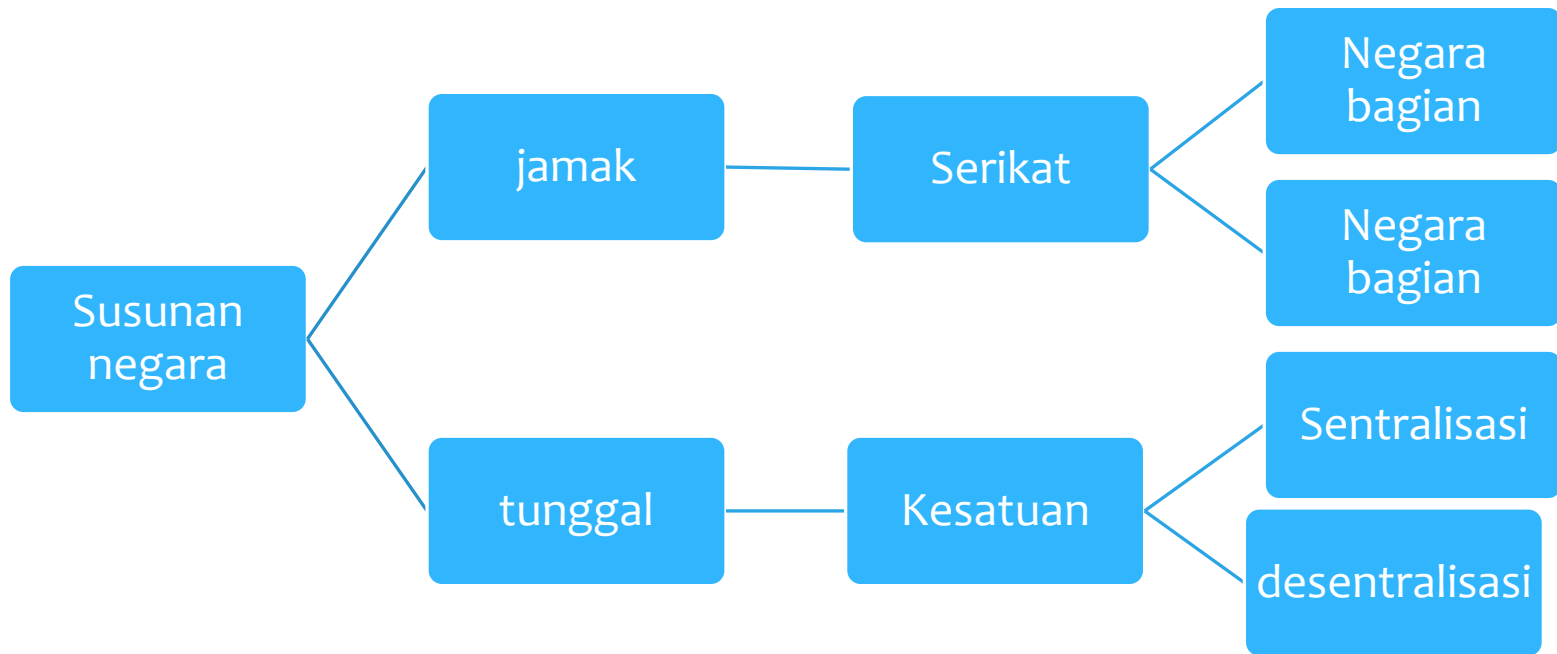
KESATUAN
(UNITARIS)

SERIKAT
(FEDERASI)

MONARKHI

REPUBLIK

BENTUK NEGARA



NEGARA KESATUAN (UNITARIAN)

Merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya di tangan pemerintah pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal (dalam negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk negara) Dua jenis negara kesatuan:

- *Sistem sentralisasi : Negara yang seluruhnya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal melaksana-kan kebijakan dari pemerintah pusat.*
- *Sistem desentralisasi yaitu Negara yang memberilkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.*

SENTRALISASI DALAM KESATUAN

● Kelebihan Sentralisasi:

- Instrumen yang efektif bagi pembentukan kesatuan politik.
- Adanya kesatuan sistem hukum) yang ditopang dengan pola yang seragam
- Mampu mengkonsolidasikan sumber daya secara efektif & efisien, dalam konteks pembangunan ekonomi dan modernisasi.
- Merupakan sarana efektif dalam pengambilan keputusan, karena hanya diputuskan oleh pemerintah pusat.

Kelemahan Sentralisasi:

- Rentan memunculkan pemerintahan tiran atau sekurang-kurangnya otoritarian.
- Memunculkan ketimpangan baik secara spasial (daerah) atau golongan, meski pertumbuhan tinggi. → Trickle Down Effect.
- Meminggirkan daerah dan tidak sensitif terhadap lokalitas (nilai, sentimen, dan aspirasi daerah).

DESENTRALISASI DALAM KESATUAN

● Kelebihan Desentralisasi:

1. Alat mengurangi kontrol Pusat dengan distribusi wewenang daerah
2. Mengatasi kesenjangan antara pusat-daerah
3. Lebih peka terhadap kebutuhan dan masalah daerah
4. Mendorong responsifitas, inovasi, dan kreativitas daerah dlm pelayanan publik
5. Meningkatkan akuntabilitas birokrasi dan wakil rakyat daerah
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal
7. Meningkatkan stabilitas nasional dan kesatuapusat.

Kelemahan Desentralisasi:

- Rentan memunculkan raja-raja kecil di daerah
- .



NEGARA FEDERASI

- ***Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republik Indonesia tahun 1949-1950***
- Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.



NEGARA FEDERASI

- Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara bagian.
- Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian seperti urusan hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Kanada, dan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.

Bentuk Pemerintahan

1. Monarkhi

Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konsti-tusional, dan monarkhi parlementer.

1. Republik

Republik dapat dibedakan atas tiga macam: Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

Kriteria membedakan Republik dan Monarkhi

- ***Jellinek → dilihat dari cara terjadinya pembentukan kemauan Negara.***
 - ***Secara Psikologis → Monarki***
 - ***Secara Yuridis → Republik***

- Leon Duguit → Penunjukkan kepala negara***
 - ***Herediter → monarkhi***
 - ***Pemilihan → Republik***

Sistem Pemerintahan

- ❑ Klasifikasi sistem pemerintahan didasarkan pada relasi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
 1. Sistem Pemerintahan Presidensial → Badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. (Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filipina, Indonesia)
 2. Sistem Pemerintahan Parlementer → badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. (Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia)

SISTEM PRESIDENSIAL

Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.

Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif
2. Kepala Eksekutif/Presiden mempunyai hak prerogratif
3. Kepala Eksekutif berperan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan
4. Legislatif tidak punya hak untuk menjatuhkan eksekutif.
5. Menteri menteri bertanggung jawab pada presiden bukan pada legislatif.
6. Adanya pemilihan langsung oleh Rakyat

SISTEM PRESIDENSIAL: KELEBIHAN & KELEMAHAN

- Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
- Penyelenggara pemerintahan lebih efektif dan solid
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.
- Masa jabatan Presiden lebih pasti, karena tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen
- Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

- Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
- Pengawasan rakyat lemah
- Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
- Pembuatan kebijakan publik hasil negosiasi eksekutif & legislatif sehingga keputusan tidak bulat.
- Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian

Sistem Parlementer

Ciri Sistem Parlementer:

1. Parlemen menjadi satu satunya badan yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai pemenang pemilu memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana meteri sebagai pemimpin kabinet yang diambil dari partai penguasa di parlemen.
4. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam system ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana meteri sebagai kepala pemerintahan.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
5. Kepala Negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden/sultan/raja
6. Sebagai imbalan, parlemen dapat menjatuhkan kabinet. Kepala Negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden/ raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk memebentuk parlemen baru.

SISTEM PARLEMENTER: KELEBIHAN & KELEMAHAN

- Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat. karena terjadi Penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative. Kekuasaan eksekutif dn legislative berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet menjadi berhati – hati dalam menjalankan pemerintahan

- Kedudukan cabinet tergantung pada mayoritas dukunga parlemen sehingga sewaktu- waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau cabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengn masa jabatannya karena sewaktu- waktu cabinet dapat bubar.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Pengalaman anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.